



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 09 TAHUN 2008

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang, Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros**

**dan**

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Maros;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Maros;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

- sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  10. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
  11. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa;
  12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa
- (2) Penghasilan tetap dan/ atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa.

#### **Pasal 3**

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Alokasi Dana Desa.

## **BAB III PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau Lembaga Pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan .
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN, PENETAPAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN**

#### **Pasal 5**

Besarnya Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa akan diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 6**

Kenaikan Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam rangka penyusiman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberlakukan pada Pos Alokasi Dana Desa (ADD).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di : Maros  
Pada tanggal : 17 April 2008

**BUPATI MAROS,**

TTD

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di : Maros  
Pada tanggal : 17 April 2008

**SEKRETARIAT DAERAH**

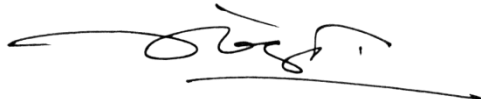
TTD

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 202 342

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS**  
**TAHUN 2008 NOMOR : 09**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)  
Nip : 19730820 199202 1 001